BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara Hukum seperti yang diatur dalam Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya dalam Pasal 1 ayat (3). Setiap tindakan warga negara, baik pemerintah maupun masyarakat harus berdasarkan atas hukum pada negara tersebut. Dalam tataran negara hukum adanya pembatasan terhadap kebebasan dalam melakukan tindakan dan segala tindakan harus tunduk kepada hukum. Hal demikian sesuai dengan pandangan *F. R. Bothlingk*, yang menyebutkan bahwa negara hukum adalah negara yang kebebasan kehendak pemegang kekuasaan dibatasi oleh ketentuan hukum.

Pertumbuhan penduduk di Indonesia terbilang sangat pesat. Semakin tinggi jumlah masyarakat berdampak terhadap ekonomi masyarakat, termasuk dalam pemenuhan kebutuhan dan lapangan pekerjaan. Hal tersebut mengakibatkan setiap masyarakat harus bersaing untuk memperoleh kebutuhan mereka. Daya saing yang ketat dapat mempengaruhi kerawanan dibidang keamanan dan ketenangan hidup masyarakat seperti tindak pidana kejahatan. Bentuk atau macam dari suatu tindak pidana seperti pembunuhan, perampokan, pencabulan, perkosaan, penggelapan, pemerasan, pencurian serta kekerasan lainnya.¹

¹ Bahtiar Bahtiar, Muh. Natsir, Herman Balla, "Kajian Yuridis Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan," *JULIA Jurnal Litigasi Amsir* Nomor 4, Volume 10, 2023. Hlm. 322

Setiap orang tentunya memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi guna menjalankan kehidupannya. Seiring dengan perkembangan zaman yang terus berkembang, membuat kebutuhan manusia menjadi terus meningkat. Besar kecilnya penghasilan yang dimiliki setiap orang akan sangat mempengaruhi kebutuhan masing-masing. Seseorang yang berpenghasilan kecil tentu akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.²

Sebagian besar anak mempunyai kemampuan dalam mengembangkan dirinya untuk dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang bertanggung jawab dan bermanfaat untuk sesama manusia. Kondisi fisik dan mental seorang anak yang masih lemah sering kali memungkinkan dirinya disalahgunakan secara legal atau ilegal, secara langsung atau tidak langsung oleh orang sekelilingnya tanpa dapat berbuat sesuatu. Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial, dalam berbagai bidang kehidupan. Perlindungan juga harus diberikan kepada anak yang melakukan perbuatan menyimpang maupun perbuatan yang melanggar hukum, khususnya dalam pelaksanaan peradilan pidana anak yang asing bagi dirinya. Anak perlu mendapat perlindungan dari kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan terhadap dirinya yang menimbulkan kerugian mental, fisik, dan sosial. Perlindungan anak dalam hal ini disebut perlindungan hukum/yuridis (*legal protection*).

² Ibid Hlm. 323

Kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa, tidak dapat disamakan begitu saja dengan perbuatan anak atau remaja yang biasa dilakukan oleh anak, sebab harus dibedakan sifat dan bentuk perbuatan seorang anak dengan perbuatan orang dewasa. Perlindungan terhadap anak dalam kaitannya anak yang bermasalah dengan hukum, sebagai bagian utama peningkatan kualitas mutu hidup manusia. Penegak hukum yang ditugaskan untuk menyelesaikan perkara pidana anak, perlu kejelian dalam menerapkan jenis sanksi pidana terhadap anak, agar anak tersebut tidak merasa kehilangan haknya sesuai yang diatur dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.³

Tindak pidana yang paling sering terjadi dikalangan masyarakat yaitu tindak pidana pencurian. Dimana dengan kondisi perekonomian yang sekarang ini sangat memprihatinkan sekali, membuat manusia tersebut menghalalkan segala cara baik itu dengan cara melawan hukum melakukan tindak pidana pencurian demi memenuhi kebutuhan kehidupan. Dari media elektronik dan media-media masa menunjukan bahwa sering terjadinya tindak pidana pencurian yang berbagai jenisnya dilatar belakangi karena kebutuhan kehidupan yang tidak terpenuhi.

Pengklasifikasian terhadap perbuatan manusia yang dianggap sebagai kejahatan didasarkan atas sifat dari perbuatan yang merugikan masyarakat,

Paul Meokdikdo merumuskan sebagai berikut:

³ Sandy Doyoba Alexsander, Yeni Widowaty, “Faktor Penyebab Timbulnya Disparitas dalam Putusan Hakim Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan”, IJCLC, Vol : 1, No : 2, Juli 2020. Hlm 73.

“Kejahatan adalah pelanggaran hukum yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan sebagai perbuatan yang sangat merugikan, menjengkelkan dan tidak boleh dibiarkan atau harus ditolak”.

Tindak Pidana pencurian diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 362-367. Sebagian besar jenis tindak pidana pencurian yang sering dilakukan adalah tindak pidana pencurian dengan pemberatan.⁴

Terhadap kasus atau tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak, putusan hakimnya dapat dilihat pada tabel data berikut ini:

⁴ Nurroffiqoh, Herry Liyus, Aga Anum Prayudi.. Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan (PAMPAS: Journal Of Criminal Volume 3 Nomor 1, 2022 (ISSN2721-8325)). Hlm. 87

Tabel. 1

Putusan Pengadilan Tentang Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak

No	Nomor Putusan	Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Amar Putusan	Ket
1	No.14/Pi d.B/2011 /PN YK	Ridwan Mei Saputra	Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan 4 KUHP	<p>Menyatakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Ridwan Mei Saputra bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 363 ayat (1) ke 3 dan 4 KUHP 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan. 3. Menyatakan barang bukti berupa: <ol style="list-style-type: none"> a. 1 (satu) buah tabung gas elpiji berat 12 kg warna biru dalam keadaan kosong, dikembalikan saksi Sugiyo Prayitno b. 1 (satu) buah tas rangsel warna hitam kombinasi biru benuliskan eastpak, dirampas untuk dimusnahkan 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah). 	<p>Mengadili:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Ridwan Mei Saputra, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” pencurian dengan pemberatan”. 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari. 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; 4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan 5. Menetapkan barang bukti berupa: <ol style="list-style-type: none"> a. 1 (satu) buah tabung gas berat 12 kg warna biru dikembalikan kepada Sugiyo Prayitno. b. 1 (satu) buah tas rangsel warna hitam kombinasi biru bertuliskan Eastpak. dirampas untuk dimusnahkan 6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar 	Incracht

					Rp.2.000,-(dua ribu rupiah)	
2	Nomor: 10 /Pid.Sus. Anak/20 15/PN YYK	a. Aldi Riyanto. b. Ardo Hidayat. c. Sudarman	Pasal 363 ayat (2) KUHP	<p>Menyatakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Aldi Riyanto bin Slamet Riyadi, Ardo Hidayat dan Sudarman bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP. 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Aldi Riyanto bin Slamet Riyadi, Ardo Hidayat dan Sudarman, masing-masing dengan pidana pengawasan selama 8 (delapan) bulan. Menetapkan supaya para anak dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah). 	<p>Mengadili:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Aldi Riyanto bin Slamet Riyadi , Ardo Hidayat dan Sudarman, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” pencurian dengan pemberatan”. 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Aldi Riyanto bin Slamet Riyadi, Ardo Hidayat dan Sudarman, oleh karena itu masing-masing dengan pidana syarat berupa pengawasan dengan menempatkan anak dibawah pengawasan Penuntut Umum dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan selama 4 (empat) bulan. 3. Membebaskan kepada anak masing-masing untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah). 	Incracht
3	Nomor:3 /Pid.Sus. Anak/20 19/PN YYK	Anak (identitas dirahasiakan)	Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP	<p>Menyatakan:</p> <p>A. Menyatakan Terdakwa Anak bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP.</p>	<p>Mengadili:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Anak, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” pencurian dengan pemberatan”. 2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak untuk 	Incracht

				<p>B. Menjatuhkan pidana terhadap Anak untuk dibina/dititipkan di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Sleman selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama anak berada dalam masa penitipan sementara.</p> <p>C. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).</p>	<p>dibina/dititipkan di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Sleman selama 6 (enam) bulan.</p> <p>3. Membebankan kepada anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).</p>	
4	Nomor: 12 /Pid.Sus. Anak/20 19/PN YYK	Anak (identitas dirahasiakan)	Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP	<p>Menyatakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Anak bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal melanggar pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana “Pembinaan dalam Lembaga” selama 9 (sembilan) bulan di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Sleman. 3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah). 	<p>Mengadili:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Anak, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” pencurian dengan pemberatan”. 2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana “Pembinaan dalam Lembaga” selama 8 (delapan) bulan di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Sleman . 3. Membebankan kepada anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah). 	Incracht
5	No.8/Pid .Sus- Anak/20 19/PN Pkb	Anak (identitas dirahasiakan)	Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUH Pidana.	<p>Menyatakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Anak Berhadapan Hukum (ABH) Xxx bin xxx terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana Pencurian Dengan 	<p>Mengadili:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Anak Xxx bin xxx, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan 	Incracht

				<p>Pemberatan” sebagaimana diatur serta diancam pidana dalam Dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUH Pidana.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Berhadapan Hukum (ABH) Xxx bin xxx dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Anak Berhadapan Hukum (ABH) Xxx bin xxx tetap ditahan.</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa:</p> <p>a. (dua) bungkus rokok sempurna</p> <p>b. uang tunai Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah). Dikembalikan kepada saksi korban Yuhastuti Binti M. Yusuf.</p> <p>4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- [Dua ribu rupiah].</p>	<p>Memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Anak Xxx bin xxx oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan.</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan.</p> <p>4. Menetapkan Anak tetap ditahan.</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa:</p> <p>a. 2 (dua) bungkus rokok sempurna</p> <p>b. uang tunai Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah). Dikembalikan kepada korban Yuhastuti Binti M. Yusuf.</p> <p>6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)</p>	
--	--	--	--	--	--	--

Sumber Data: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 2024

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Deskripsi Tentang Putusan Hakim Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk tindak pidana pencurian dengan pemberatan?
2. Bagaimana cara pelaku melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan?
3. Bagaimana akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulis untuk meneliti masalah di atas adalah untuk mengetahui:

- a. Untuk mengetahui bentuk tindak pidana pencurian dengan pemberatan.
- b. Untuk mengetahui cara melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan.
- c. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap pelaku pencurian dengan pemberatan.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup berarti sebagai literatur ilmiah yang dapat dijadikan bahan kajian untuk memperkaya Kegunaan Teoritis Penelitian pengetahuan dan pemikiran para insan hukum, khususnya di dalam hukum pidana yang berkaitan dengan kejahatan pencurian.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai Salah satu bahan referensi bagi Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dalam rangka pengembangan serta pendalaman ilmu hukum, khususnya Hukum Pidana.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran Penulis melalui Perpustakaan Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, Penulis dapat menemukan fakta hukum bahwa Penelitian dengan judul Deskripsi Tentang Putusan Hakim Terhadap Anak Pelaku Pencurian Dengan Pemberatan adalah asli. Penelitian terdahulu yang mirip dengan kasus yang sementara diteliti oleh Penulis sekarang, antara lain:

1. Nama : Musa Tri Kusuma
NIM : 17314046
Judul : Disparitas Putusan Pemidaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan.
Apa dasar pertimbangan hakim sehingga terjadi
Rumusan Masalah : disparitas pemidaan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan?

2. Nama : I Putu Mahardika
NIM : 17314013
Judul : Deskripsi Tentang Disparitas Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian.
Rumusan Masalah : Bagaimanakah pertimbangan hakim sehingga terjadinya disparitas hukuman terhadap pelaku tindak pidana pencurian?
3. Nama : Putra Damai Mautuka
NIM : 18310174
Judul : Deskripsi Tentang Motif Dan Modus Dan Akibat Hukum Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Oleh Residivis.
Bagaimanakah motif terjadi tindak pidana
Rumusan Masalah : pencurian kendaraan bermotor oleh residivis?
4. Nama : Yumina Padalani
NIM : 17312243
Judul : Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindakan Pidana Pencurian Di Pengadilan Negeri Kupang.
Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim
Rumusan Masalah : dalam menjatuhkan putusan yang berbeda terhadap tindak pidana pencurian?

5. Nama : Kanisius Amario Seran Kehi
- NIM : 17312336
- Judul : Disparitas Putusan Pemidaan Dalam Tindak Pidana
Pencurian Dengan Pemberatan.
- Rumusan Masalah : Mengapa terjadi Disparitas putusan pemidaan
dalam tidak pidana pencurian dengan pemberatan?

E. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Berdasarkan judul di atas, maka sifat penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini bersifat deskriptif yaitu, penelitian yang berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti secara mendalam, luas, dan terperinci. Sifat deskriptif dalam penelitian ini adalah, penulis hendak menggambarkan tentang bentuk, cara Pelaku dalam melakukan tindak pidana pencurian dengan pemmberatan serta akibat hukum terhadap pelaku.⁵

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Menurut *Soerjono Soekanto*, penelitian hukum ini terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum.

3. Variabel Penelitian

Adapun variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁵ H. Iahaq, *Metode Penelitian Hukum (Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi)*, Bandung, Alfabeta, 2017, Hlm. 66

a. Variabel Bebas

Variabel bebas (*independent variable*) atau yang disebut juga variabel berpengaruh atau variabel yang mempengaruhi variabel dalam penelitian ini adalah bentuk, cara, dan akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

b. Variabel terikat

Variabel terikat (*dependent variable*) atau yang disebut juga variabel output yaitu ubahan terikat dipengaruhi akibat dari adanya pengubah variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah putusan pengadilan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

4. Sumber Data

Menurut *Soerjono Soekanto*, di dalam penelitian hukum, sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari tiga bahan hukum yaitu:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.

Dalam penelitian ini, bahan hukum tersebut terdiri dari :

1) Peraturan Perundang-Undangan

a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

c) Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2) Putusan pengadilan :

a) Putusan Pengadilan Negeri No.14/pid.B/2011/PN YYK

b) Putusan Pengadilan Negeri No.10/pid.sus.Anak/2015/PN YYK

c) Putusan Pengadilan Negeri No 3/pid.sus.Anak/2019/PN YYK

d) Putusan Pengadilan Negeri No 12/pid.sus.Anak/2019/PN YYK

e) Putusan Pengadilan Negeri No.8/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pkb

b. Bahan sekunder

Bahan sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah rancangan perundang-undangan, jurnal-jurnal ilmiah karya tulis hukum atau pandangan ahli hukum, kasus-kasus hukum yang berkaitan dengan masalah penelitian.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang digunakan untuk menjelaskan dan memberikan perunjuk terhadap bahan primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamus dan ensiklopedia hukum.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan studi dokumen atau studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

6. Analisis Data

Semua data yang diperbolehkan baik dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder diolah secara kualitatif. Dengan kata lain analisis kualitatif adalah cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum konsep, teori, doktrin, peraturan perundang-undangan, prinsip hukum atau pandangan penulis sendiri. Maka selanjutnya penulis akan mempelajari, meneliti, serta mengolah data yang akan ditarik suatu kesimpulan secara logis .